



**BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KOTA MAKASSAR**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) TAHUN 2022

Jl. Ahmad Yani No. 2 Makassar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nyalah sehingga penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 dapat terselesaikan.


Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Tahun 2022 merupakan rencana pengendalian dan evaluasi program pengawasan tahunan yang disusun untuk mewujudkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar. Selain dari pada itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar juga diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program pengawasan penyelenggaraan Pemerintah di Kota Makassar, disamping itu peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2022 selain mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Kami menyadari dokumen ini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 terdiri dari 1) Pendahuluan; 2) Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu; 3) Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah; 4) Program dan Kegiatan yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; 5) Penutup.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Tahun 2022 dan semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Makassar, 5 Juli 2021

Plt. KEPALA BADAN,



AKHMAD NAMSUNG, S.Ag. MM
Pangkat : Pembina
NIP. 19670524 200601 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	31
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	34
2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah	35
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	50
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	51
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	51
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	52
3.3. Program dan Kegiatan	53
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	65
BAB V PENUTUP	71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rata-Rata Capaian Kinerja Utama	8
Tabel T-C-29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (tahun berjalan)	17
Tabel T-C-30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol Kota Makassar Tahun 2021	32
Tabel T-C-31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kota Makassar	37
Tabel T-C-32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kota Makassar	50
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesbangpol Kota Makassar	53
Tabel T-C-33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 203 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar	58

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Tahun 2022 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Perencanaan yang dilaksanakan untuk dasar pembangunan tahunan dituangkan dalam dokumen yang telah diamanatkan oleh tata aturan yang berlaku secara nasional disebut Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah pada prinsipnya merupakan proses pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar.
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2021.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja

Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah; dan
2. Tahap penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah.

Pemerintah Kota Makassar memiliki RPJMD untuk periode 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan indikasi kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Hal ini berdampak pada penyusunan dokumen perencanaan tahunan.

Untuk menjamin terciptanya keberhasilan pembangunan dan guna mengatasi tantangan pelaksanaan pembangunan kota Makassar tahun 2022, maka diperlukan keselarasan dan kesinambungan pembangunan antara program pemerintah pusat dan pemerintah daerah, atas dasar ini maka RKPD Kota Makassar Tahun 2022 disusun berdasarkan tema dalam visi RPJMD Kota Makassar adalah **“Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang Sombere’ & Smart City dengan Imunitas Kuat Untuk Semua”**

Perencanaan pembangunan dalam RKPD Kota Makassar Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2021-2026, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2023, Sustainable Development Goals

(SDGs) 2015-2030, masukan dan aspirasi dari semua pelaku pembangunan berdasarkan hasil musrembang Kota Makassar dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan peran dan fungsi koordinasi, pembinaan, dan pelayanan kepada masyarakat menjamin agar setiap kebijakan Walikota Makassar sebagai Kepala Daerah, dapat dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Makassar secara, efisien, ekonomis dan akuntabel, sehingga dengan demikian kebijakan Walikota Makassar dapat berjalan secara efektif.

Rencana alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan, didasari dengan kemampuan dana yang tersedia dengan tetap berpedoman pada prinsip efisiensi dan urgensi masing-masing program dan kegiatan. Mengingat semakin kompleksnya permasalahan dalam hal pelayanan, pembinaan, koordinasi, yang harus dilaksanakan, maka untuk mendukung terlaksananya kegiatan diperlukan kesiapan aparat Badan Kesbangpol yang berkualitas, tersedianya dukungan sarana dan fasilitas serta anggaran yang memadai sesuai kemampuan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2018 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
25. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017.);
26. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor ... Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor ... Tahun 2021);
27. Peraturan Walikota Makassar Nomor 87 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 87);
28. Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Tahun 2022 adalah sebagai pedoman pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Tahun 2022 serta program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Tahun 2022 adalah untuk menjadi tolok ukur pencapaian target kinerja SKPD dalam satu tahun dan sebagai bahan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan;

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan Renja SKPD yang terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan renja SKPD dan sistematika penyusunan.

Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu;

Bab ini menjelaskan tentang evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Sebelumnya dan Capaian Renstra SKPD yang memuat evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun 2020 (4 triwulan) dan evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun 2021 (2 triwulan), Analisis kinerja pelayanan SKPD, Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, Review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab ini menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja-PD, program dan kegiatan SKPD yang berisikan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, dan uraian garis besar program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;

Mengemukakan Rencana Program dan Kegiatan yang disusun berdasarkan Evaluasi Pembangunan Tahunan, kedudukan tahun Rencana Kerja tahun 2022 dan Capaian Kinerja yang direncanakan serta Pagu Indikatifnya

Bab V Penutup;

Bab ini merupakan penutup yang berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Untuk memantapkan perencanaan pemerintahan umum tahun 2022 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2020 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2021. Pada tahun 2020 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar telah melaksanakan sebanyak **9 (sembilan) program dan 86 (delapan puluh enam) kegiatan, terdiri dari 5 (lima) program penunjang/pendukung, 35 (tiga puluh lima) kegiatan dan 4 (empat) program utama, 51 (lima puluh satu) kegiatan dengan total realisasi anggaran tahun 2020 adalah sebesar Rp. 8.257.905.365,00 (Delapan Milyard Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah)** atau 88,48% dari alokasi anggaran dalam APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp. 9.333.080.900,00 (Sembilan Milyard Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah).**

Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Rata-rata capaian kinerja dari 3 sasaran strategis dicapai dengan kategor sangat tinggi, sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Rata-Rata Capaian Kinerja Utama

No	Sasaran		Target Rencana Kerja	Persentase		
	Uraian	Indikator Kinerja		Realisasi	Tingkat Capaian	Rata-Rata
1	Terlaksananya administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif serta dapat diakses publik	Indeks kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	100,00%	
2	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	100,00%	
3	Terlaksananya disiplin kepada aparatur	Presentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Disiplin bagi aparatur	100 %	98,4 %	98,40%	

4	Tersedianya aparatur yang memadai dan siap bekerja	Cakupan aparatur yang mendapatkan pelatihan kompeten dibidangnya	4 org	4 org	100,00%	
5	Tersedianya data/laporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase capaian kinerja yang termuat dalam citizen's charter SKPD	100 %	100 %	100,00%	
6	Terwujudnya masyarakat yang religius dan berakhlak mulia serta memiliki toleransi antar umat beragama	Persentase organisasi kemasyarakatan / politik mitra yang aktif, terdaftar dan telah mendapatkan pembinaan dalam penguatan kesatuan bangsa	100 %	92 %	92,00%	
7	Meningkatnya ketentraman, ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase jumlah konflik dan gangguan keamanan horizontal yang tertangani	95 %	95 %	100,00%	
8	Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat	Persentase jumlah konflik umat beragama dan etnis yang tertangani	95 %	95 %	100,00%	
9	Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat untuk berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Menekan persentase pengguna narkoba 1,9 % pertahun dari jumlah penduduk Kota Makassar	1,5 % dari jumlah penduduk kota Makassar	1,0 dari jumlah penduduk kota Makassar	66,67%	
Rata - Rata Pencapaian						95,23%

Hasil tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa persentase tingkat rata-rata capaian kerja pada tahun 2020 sebesar 95,23% dari target 100% dengan kategori sangat tinggi. Dari sembilan program sebagian besar dinyatakan BERHASIL dengan 9 (sembilan) indikator kinerja, diantaranya memiliki capaian target 100% sebanyak 6 (enam) indikator kinerja, sedangkan 3 (tiga) indikator kinerja dibawah 100% yaitu :

- Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran disiplin Aparatur memiliki capaian target \leq 100% (98,40%)
- Persentase organisasi kemasyarakatan / politik mitra yang aktif, terdaftar dan telah mendapatkan pembinaan dalam penguatan kesatuan bangsa, memiliki capaian target \leq 100% (92,00%)
- Menekan persentase pengguna narkoba 1,9% pertahun dari jumlah penduduk Kota Makassar memiliki capaian target \leq 100% (66.67%)

Realisasi capaian target kinerja 4 (empat) program utama dan 5 (lima) program pendukung adalah sebagai berikut :

A. Program Utama

1. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Realisasi kinerja Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan indikator Persentase organisasi kemasyarakatan / politik mitra yang aktif, terdaftar dan telah mendapatkan pembinaan dalam penguatan kesatuan bangsa, adalah sebesar 501 Ormas/LSM/Yayasan/Orpol atau 92,00% dari target sebesar 544 Ormas/LSM/Yayasan/Orpol atau 100%. Tingkat capaian kinerja sebesar 92,00% jika dibandingkan dengan target tahun 2020. Atau 92,00 % apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan).

a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

- 1) Adanya kekompakan dan motivasi kerja aparatur lingkup Badan Kesbangpol dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diberikan.
- 2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bekerjasama melakukan koordinasi secara rutin dan berkala dengan LSM/Ormas dan Partai Politik dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga tersebut.
- 3) Tingginya antusiasme pengurus LSM/Ormas dan Partai Politik dalam menindaklanjuti hasil kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kota Makassar

b. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

- 1) Kelembagaan demokrasi yang masih belum terlalu kokoh.
- 2) Penyelenggaraan pemilihan umum masih menyisakan berbagai persoalan, terutama mengenai daftar pemilih tetap dan penetapan hasil pemilihan umum.
- 3) Belum optimalnya kapasitas organisasi partai politik dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Hal itu ditandai oleh relatif kurang berperannya kelembagaan politik dalam melaksanakan fungsi-fungsi artikulasi kepentingan masyarakat maupun dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.
- 4) Masih kurangnya pemahaman pengurus ormas/orpol tentang penetapan aturan dan landasan hukum yang baru kepada organisasi di daerah khususnya pada proses pendaftaran organisasi di pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yakni permendagri No.33 Tahun 2012 tentang pedoman pendaftaran organisasi kemasyarakatan lingkup Kementerian Dalam Negeri maupun pemerintah Daerah.
- 5) Kurang lengkapnya alamat detail sekretariat organisasi yang akan diverifikasi oleh tim verifikator dari Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kota Makassar, sehingga lokasi atau sekretariat yang ada pada dokumen pemberkasan ormas/orpol tersebut tidak jelas dan tidak ditemukan.

- 6) Kurangnya aturan yang memuat sanksi administrasi kepada ormas/orpol yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai ormas/orpol.
- 7) Masih rendahnya kualitas pengurus dan anggota ormas/orpol dalam menjalankan organisasinya termasuk administrasi yang ada pada ormas/orpol tersebut.

2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Sosial

Realisasi kinerja Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Sosial dengan indikator Persentase jumlah konflik dan gangguan keamanan horizontal yang tertangani adalah sebesar 95% dari target sebesar 95%. Tingkat capaian kinerja sebesar 100% jika dibandingkan dengan target tahun 2020. Atau 100% apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan).

a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

- 1) Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan dengan baik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar yang bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan dengan tidak terpengaruh dengan provokasi-provokasi yang menimbulkan konflik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, agar tercipta suasana kondusif di Kota Makassar
- 2) Para tokoh masyarakat, senantiasa memberikan arahan/musyawarah dan pemantauan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh dan terprovokasi terhadap isu-isu yang menimbulkan konflik baik kepada kelompok-kelompok tertentu, sehingga tercipta suasana kondusif di Kota Makassar.
- 3) Penegakan sanksi dan hukum terhadap oknum yang terbukti melaksanakan provokasi atau tindakan-tindakan yang memicu konflik dan mengganggu kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya dalam wilayah Kota Makassar.

b. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

- 1) Masih adanya gejala terorisme dan berbagai bentuk tindakan melawan hukum lainnya serta gangguan terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban umum. Selain itu, dalam hubungan antar

kelompok masyarakat, masih ditemukan adanya insiden-insiden kekerasan yang melanggar hukum diantara sebagian kelompok masyarakat.

- 2) Masih adanya potensi terjadinya perang kelompok
- 3) Masih adanya potensi tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh sekelompok geng motor.

3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Realisasi kinerja Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan indikator Persentase jumlah konflik umat beragama dan etnis yang tertangani adalah sebesar 95% (tidak terjadi konflik umat beragama dan etnis selama tahun 2020) dari target sebesar 95%. Tingkat capaian kinerja sebesar 100% jika dibandingkan dengan target tahun 2020. Atau 100% apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan).

a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

- 1) Terlaksananya sosialisasi yang melibatkan tokoh etnis, organisasi daerah, sehingga mampu meminimalisir terjadinya konflik antar asrama/mahasiswa antar daerah.
- 2) Dengan terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar bekerjasama dan berkoordinasi secara rutin dan berkala dengan para pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), untuk melakukan kunjungan ke setiap kecamatan/kelurahan dan bertemu Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat serta masyarakat pada umumnya dengan tujuan agar masyarakat juga tahu setiap akar munculnya masalah/konflik yang akan terjadi sehingga dapat dilakukan deteksi dini sebagai pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap ancaman yang mungkin timbul khususnya di Kota Makassar.
- 3) Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan dengan baik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar yang bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya menjaga toleransi antar umat beragama dengan tidak terpengaruh dengan provokasi-provokasi yang menimbulkan konflik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, agar tercipta suasana kondusif di kota Makassar
- 4) Para tokoh masyarakat, tokoh agama, pengurus etnis dan komunitas

etnis yang senantiasa memberikan arahan/musyawarah dan pemantauan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh dan terprovokasi terhadap isu-isu yang menimbulkan konflik baik kepada kelompok-kelompok tertentu, pemeluk agama dan etnis/kelompok suku lainnya, sehingga tercipta suasana kondusif di Kota Makassar.

- 5) Penegakan sanksi dan hukum terhadap oknum yang terbukti melaksanakan provokasi atau tindakan-tindakan yang memicu konflik dan mengganggu kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya dalam wilayah Kota Makassar

b. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

- 1) Belum meratanya keterlibatan RT/RW sebagai peserta kegiatan sosialisasi, yang disebabkan karena minimnya data RT/RW terpilih, dan ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam menunjang pelaksanaan setiap kegiatan-kegiatan sosialisasi yang kami laksanakan.
- 2) Belum meratanya keterlibatan Mahasiswa khususnya mahasiswa yang berasal dari luar Kota Makassar, sebagai peserta kegiatan sosialisasi, yang disebabkan karena minimnya data asrama mahasiswa daerah. Bahkan ada beberapa asrama mahasiswa yang sudah tidak dihuni (kosong). ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam menunjang pelaksanaan setiap kegiatan-kegiatan sosialisasi yang kami laksanakan
- 3) Perlunya penguatan integrasi dan intergritas bangsa.
- 4) Masih adanya penggunaan cara-cara penyampaian pendapat yang mengabaikan/melecehkan simbol-simbol negara, bahkan ada yang cenderung anarkis dan masih adanya kecenderungan lebih mementingkan kepentingan kelompok dari pada kepentingan umum.

4. Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Realisasi kinerja Program pencegahan penyalahgunaan narkotika dengan indikator Menekan persentase Pengguna Narkotika 1,9% pertahun dari jumlah penduduk Kota Makassar adalah sebesar 1,0% dari target sebesar 1,5%. Tingkat capaian kinerja sebesar 66,67% jika dibandingkan dengan target tahun 2020. Atau 66,67 % apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan).

a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

- 1) Terlaksananya sosialisasi dengan baik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar yang bertujuan

untuk memberi pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya memberantas narkoba agar peredaran narkoba dapat diminimalisir khususnya di Kota Makassar

- 2) Penegakan sanksi dan hukum terhadap orang yang terbukti mengedar, dan menggunakan narkoba
- 3) Adanya koordinasi seluruh stakeholders dalam memberantas penggunaan narkoba dan obat terlarang lainnya

b. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

- 1) Minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang dampak buruk dari narkoba dan zat adiktif lainnya, sehingga kurang terlibat dalam memberantas narkoba.

B. Program Penunjang/Pendukung

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Realisasi kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah sebesar 100 %. Tingkat capaian kinerja sebesar 100% Jika dibandingkan dengan target tahun 2020. Atau 100% apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan).

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Realisasi kinerja Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur dengan indikator Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah sebesar 100 %. Tingkat capaian kinerja adalah sebesar 100% Jika dibandingkan dengan target tahun 2020. Atau 100% apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan).

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Realisasi kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan indikator Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran disiplin Aparatur adalah sebesar 100 %. Tingkat capaian kinerja adalah sebesar 98,40% Jika dibandingkan dengan target tahun 2020. Atau 98,40% apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan).

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Realisasi kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan indikator Cakupan aparaturnya yang mendapatkan pelatihan kompeten dibidangnya adalah sebesar 4 orang. Tingkat capaian kinerja sebesar 100%

Jika dibandingkan dengan target tahun 2020. Atau 100% apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan).

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Realisasi kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan dengan indikator Persentase capaian kinerja yang termuat dalam citizen's charter SKPD adalah sebesar 100 %. Tingkat capaian kinerja sebesar 100% Jika dibandingkan dengan target tahun 2020. Atau 100 % apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan).

TABEL T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK S/D
TAHUN 2021 (TAHUN BERJALAN)
KOTA MAKASSAR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Perangkat Daerah Tahun (2014 - 2019)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) /2018	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) / 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) / 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran	90 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	300 %	333%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	6 org	6 org	6 org	6 org	100%	6 org	18 org	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penerima jasa kebersihan kantor	2 org	2 org	2 org	2 org	100%	2 org	6 org	
	Penyediaan Jasa pendukung Administrasi Kantor / teknis Lainnya	Jumlah penerima jasa pendukung administrasi kantor/teknis lainnya	36 org	36 org	36 org	36 org	100%	36 org	108 org	
	Penyediaan bahan bacaan	Jumlah bahan bacaan dan perundang undangan yang tersedia	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	3 jenis	9 jenis	
	Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya barang ATK	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	4 %	204 %	
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Persentase kegiatan rapat-rapat koordinasi yang terlaksana	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	48 %	248 %	
	Pembuatan Profil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar	Jumlah buku profil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar	150 buah	0 buah	150 buah	150 buah	100%	0 buah	150 buah	

		yang diadakan								
	Sosialisasi Kinerja Pelayanan Publik	Tercapainya kinerja dan pelayanan publik	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	3 dokumen	5 dokumen	
	Penyediaan jasa jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah jasa jaminan sosial ketenagakerjaan	36 org	36 org	36 org	36 org	100%	36 org	108 org	
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	90 %	100 %	100 %	66,15 %	66%	100 %	266,15 %	296%
	Pengadaan Alat Kantor	Jumlah alat kantor yang tersedia	3 jenis/unit	3 jenis/unit	3 jenis/unit	0 jenis/unit	0%	3 jenis/unit	6 jenis/unit	
	Pengadaan Alat Rumah Tangga	Jumlah perlengkapan rumah tangga yang tersedia	3 jenis/unit	3 jenis/unit	3 jenis/unit	3 jenis/unit	100%	3 jenis/unit	9 jenis/unit	
	Pengadaan komputer	Jumlah komputer yang tersedia	2 jenis/unit	2 jenis/unit	2 jenis/unit	2 jenis/unit	100%	2 jenis/unit	6 jenis/unit	
	Pengadaan alat komunikasi	Terpenuhinya pengadaan alat komunikasi	27 jenis/unit	0 jenis/unit	27 jenis/unit	0 jenis/unit	0%	0 jenis/unit	0 jenis/unit	
	Pengadaan Alat Studio	Jumlah alat studio yang tersedia	27 jenis/unit	0 jenis/unit	27 jenis/unit	0 jenis/unit	0%	0 jenis/unit	0 jenis/unit	
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah kendaraan/mobil jabatan yang siap pakai	1 jenis/unit	1 jenis/unit	1 jenis/unit	1 jenis/unit	100%	1 jenis/unit	3 jenis/unit	
	Pemeliharaan rutin/berkala alat angkutan darat bermotor	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang siap pakai	27 unit kendaraan	27 unit kendaraan	27 unit kendaraan	27 unit kendaraan	100%	27 unit kendaraan	81 unit kendaraan	
	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang siap pakai	20 unit AC	20 unit AC	20 unit AC	19 unit AC	95%	20 unit AC	59 unit AC	
	Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang siap pakai	36 unit	36 unit	36 unit	35 unit	97%	36 unit	107 unit	
	Penyediaan jasa perizinan dan sertifikasi	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terbayarkan pajaknya	28 unit	9 unit	28 unit	7 unit	25%	28 unit	44 unit	
	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang berfungsi dengan baik	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	6 jenis	

	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik	Jumlah komponen instalasi listrik yang berfungsi dengan baik	0 jenis	0 jenis	0 jenis	0 jenis	-	0 jenis	0 jenis	
	Pengadaan aplikasi sistem informasi manajemen (SIM)	Jumlah aplikasi sistem informasi manajemen (SIM) yang tersedia	2 paket	0 paket	2 paket	1 paket	50%	0 paket	1 paket	
	Pemeliharaan rutin/berkala aplikasi sistem informasi manajemen (SIM)	Jumlah aplikasi sistem informasi manajemen (SIM) yang tersedia	1 paket	0 paket	1 paket	0 paket	0%	0 paket	0 paket	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Disiplin bagi aparatur	90 %	95 %	100 %	95 %	95%	100 %	290 %	322%
		Persentase ketersediaan pakaian dinas pegawai	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	300 %	300%
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	63 org/stell	63 org/stell	63 org/stell	63 org/stell	100%	63 org/stell	189 org/stell	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan aparatur yang mendapatkan pelatihan kompeten dibidangnya	20 org	4 org	4 org	10 org	250%	4 org	18 org	90%
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah org yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal	20 org	4 org	4 org	4 org	100%	10 org	18 org
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase capaian kinerja yang termuat dalam citizen's charter SKPD	90 %	0 %	100 %	0 %	0%	100 %	100 %	111%
		Persentase capaian kinerja yang termuat dalam perjanjian kinerja perangkat daerah	0 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	300 %	-
	Penyusunan RKA OPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan 2017 dan RKA Pokok 2018 yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	6 dokumen	
	Penyusunan DPA OPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan 2017 dan DPA Pokok 2018 yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	6 dokumen	

	Penyusunan RENJA OPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja OPD yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	
	Penyusunan LAKIP OPD	Jumlah LAKIP OPD yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	
	Penyusunan Perjanjian Kinerja	Jumlah dokumen TAPKIN yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	
	Penyusunan RENSTRA OPD	Jumlah dokumen RENSTRA OPD yang tersusun	dokumen	0 dokumen	dokumen	dokumen	-	0 dokumen	0 dokumen	
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Dan Laporan Keuangan Akhir Tahun Serta Perhitungan Penyusutan Aset OPD	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	
	Pengelolaan Keuangan OPD	Jumlah kegiatan pengelolaan keuangan OPD	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	17 bulan	41 bulan	
	Peningkatan kinerja pelayanan dan administrasi	Jumlah jasa kinerja pelayanan dan administrasi	42 org	1 org	42 org	42 org	100%	3 org	46 org	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban penerima hibah dan bantuan sosial	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban hibah dan bansos	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	
6	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase organisasi kemasyarakatan / politik mitra yang aktif, terdaftar dan telah mendapatkan pembinaan dalam penguatan kesatuan bangsa	19,49 %	97,2 %	100 %	12,87 %	13%	100 %	210,07 %	1078%
			108 Organisasi	429 Organisasi	544 Organisasi	70 Organisasi	13%	544 Organisasi	1043 Organisasi	966%
	Sosialisasi Pendidikan Politik bagi tokoh Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi Pendidikan Politik bagi tokoh masyarakat	800 org	800 org	800 org	800 org	100%	800 org	2400 org	

	Pendidikan Politik bagi Pemilih Muda	Jumlah peserta pemilih muda yang mendapat pendidikan politik	200 org	200 org	200 org	200 org	100%	200 org	600 org	
	Sosialisasi pegajian / pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol	Jumlah peserta Sosialisasi pegajian / pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol	200 org	200 org	200 org	200 org	100%	200 org	600 org	
	Forum Dialog Politik Pemuda	Jumlah peserta Forum Dialog Politik Pemuda	200 org	200 org	200 org	200 org	100%	200 org	600 org	
	Sosialisasi Hubungan Kelembagaan antar Kelurahan/Kecamatan	Jumlah peserta Sosialisasi Hubungan Kelembagaan antar Kelurahan/Kecamatan	200 org	200 org	200 org	0 org	0%	200 org	400 org	
	Pos Koordinasi antara Pemerintah Kota dan Instansi terkait dalam Pelaksanaan Pemilu/Pemilukada (komunikasi pada sektor sosialisasi pemilu/pemilukada dengan instansi terkait)	Jumlah rekomendasi hasil Koordinasi antara Pemerintah Kota dan Instansi terkait dalam Pelaksanaan Pemilu/Pemilukada	20 rekomendasi	0 rekomendasi	20 rekomendasi	20 rekomendasi	100%	20 rekomendasi	40 rekomendasi	
	Monitoring Hubungan Kelembagaan Kelurahan/Kecamatan	Jumlah kegiatan monitoring Hubungan Kelembagaan Kelurahan/Kecamatan	6 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	-	kegiatan	0 kegiatan	
		Jumlah rekomendasi hasil monitoring Hubungan Kelembagaan Kelurahan/Kecamatan	0 rekomendasi	20 rekomendasi	20 rekomendasi	20 rekomendasi	100%	20 rekomendasi	60 rekomendasi	
	Verifikasi kelengkapan pengajuan bantuan partai politik	Jumlah kegiatan verifikasi kelengkapan pengajuan bantuan partai politik	12 kegiatan	0 kegiatan	12 kegiatan	kegiatan	0%	kegiatan	0 kegiatan	
		Jumlah rekomendasi hasil verifikasi kelengkapan pengajuan bantuan partai politik	20 rekomendasi	20 rekomendasi	20 rekomendasi	20 rekomendasi	100%	20 rekomendasi	60 rekomendasi	
	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi	Jumlah peserta Sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun	200 org	200 org	200 org	200 org	100%	200 org	600 org	

	Kemasyarakatan	2013 tentang organisasi Kemasyarakatan								
	Verifikasi dan administrasi izin penelitian dan pendaftaran Ormas	Jumlah kegiatan izin penelitian dan pendaftaran Ormas	12 kegiatan	kegiatan	12 kegiatan	kegiatan	0%	kegiatan	0 kegiatan	
		Jumlah rekomendasi izin penelitian dan pendaftaran Ormas yang dikeluarkan	2000 rekomendasi	2000 rekomendasi	2000 rekomendasi	2000 rekomendasi	100%	20 rekomendasi	4020 rekomendasi	
	Pemantauan keberadaan ormas /LSM	Jumlah kegiatan pemantauan Ormas/LSM	12 kegiatan	kegiatan	12 kegiatan	kegiatan	0%	kegiatan	0 kegiatan	
		Jumlah rekomendasi hasil pemantauan Ormas/LSM	20 rekomendasi	20 rekomendasi	20 rekomendasi	20 rekomendasi	100%	20 rekomendasi	60 rekomendasi	
	Jambore organisasi Masyarakat tingkat Kota Makassar	Jumlah peserta Jambore organisasi Masyarakat tingkat Kota Makassar	100 org	100 org	100 org	0 org	0%	100 org	200 org	
	Sosialisasi pendidikan politik penguatan kesatuan bangsa bagi organisasi Politik, organisasi Masyarakat dan LSM	Jumlah peserta Sosialisasi pendidikan politik penguatan kesatuan bangsa bagi organisasi Politik, organisasi Masyarakat dan LSM	200 org	200 org	200 org	200 org	100%	200 org	600 org	
	Sosialisasi nilai-nilai pendidikan politik terhadap penguatan kesatuan bangsa untuk organisasi Politik, organisasi Masyarakat dan LSM	Jumlah peserta Sosialisasi nilai-nilai pendidikan politik terhadap penguatan kesatuan bangsa untuk organisasi Politik, organisasi Masyarakat dan LSM	200 org	200 org	200 org	200 org	100%	200 org	600 org	
	Pemantauan persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan pelaksanaan pemilu dan pemilukada	20 rekomendasi	20 rekomendasi	20 rekomendasi	0 rekomendasi	0%	0 rekomendasi	20 rekomendasi	
	Sosialisasi Undang Undang Nomor 7 tentang Besaran Bantuan	Jumlah peserta Sosialisasi Undang Undang Nomor 7 tentang	200 org	0 org	200 org	0 org	0%	200 org	200 org	

	Keuangan Partai Politik	Besaran Bantuan Keuangan Partai Politik								
	Bimtek Orientasi Tahapan Pemilu bagi tokoh masyarakat, RT/RW se Kota Makassar	Jumlah peserta Bimtek Orientasi Tahapan Pemilu bagi tokoh masyarakat, RT/RW se Kota Makassar	1000 org	1500 org	1000 org	0 org	0%	0 org	1500 org	
	Desk Pilkada Serentak	Jumlah kegiatan Desk Pilkada serentak	9 kegiatan	9 kegiatan	9 kegiatan	0 kegiatan	0%	0 kegiatan	9 kegiatan	
	Satuan Tugas Peningkatan Partisipasi Pemilih & Pengawasan Partisipatif Pemilu Serentak	Jumlah kegiatan peningkatan partisipasi pemilu yang terlaksana	9 kegiatan	9 kegiatan	9 kegiatan	0 kegiatan	0%	0 kegiatan	9 kegiatan	
	Rapat kordinasi teknis penyelenggaraan pemilu serentak bagi unsur kecamatan / kelurahan, LPM, RT/RW Kota Makassar	Jumlah peserta Rapat kordinasi teknis penyelenggaraan pemilu serentak bagi unsur kecamatan / kelurahan, LPM, RT/RW Kota Makassar	800 org	800 org	800 org	0 org	0%	0 org	800 org	
7	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Sosial	Persentase jumlah konflik dan gangguan keamanan horizontal yang tertangani	80 %	100 %	95 %	100 %	105%	95 %	295 %	369%
	Sosialisasi pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Peserta Sosialisasi pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	700 org	700 org	700 org	300 org	43%	700 org	1700 org	
	Sosialisasi Pencegahan aksi geng motor lingkup kota makassar	Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan aksi geng motor lingkupKota Makassar	100 org	100 org	100 org	0 org	0%	100 org	200 org	
	Sosialisasi Kewaspadaan Dini Potensi Konflik	Jumlah Peserta Sosialisasi Kewaspadaan Dini Potensi Konflik	100 org	100 org	100 org	100 org	100%	100 org	300 org	
	Bimtek Resolusi Konflik	Jumlah Peserta Bimtek Resolusi Konflik	100 org	100 org	100 org	100 org	100%	100 org	300 org	
	Sosialisasi Rekonsiliasi	Jumlah Peserta	100 org	100 org	100 org	100 org	100%	100 org	300 org	

	Konflik	Sosialisasi Rekonsiliasi Konflik								
	Pengendali Kegiatan Unjuk Rasa	Jumlah kegiatan pengendali unjuk rasa	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	120 kegiatan	144 kegiatan	
	Dewan Penasehat dan Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah kegiatan koordinasi forum kewaspadaan dini masyarakat	12 kegiatan	kegiatan	12 kegiatan	0 kegiatan	0%	kegiatan	0 kegiatan	
		Jumlah rekomendasi hasil koordinasi forum kewaspadaan dini masyarakat	20 rekomendasi	20 rekomendasi	20 rekomendasi	20 rekomendasi	100%	20 rekomendasi	60 rekomendasi	
	Inpres Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Gangguan Keamanan Dalam Negeri	Jumlah kegiatan koordinasi Inpres Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Gangguan Keamanan Dalam Negeri	4 triwulan	0 triwulan	4 triwulan	0 triwulan	0%	0 triwulan	0 triwulan	
	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi penanganan konflik sosial	20 rekomendasi	20 rekomendasi	20 rekomendasi	20 rekomendasi	100%	20 rekomendasi	60 rekomendasi	
	Pembinaan dan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (KOMINDA)	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (KOMINDA)	12 kegiatan	20 kegiatan	12 kegiatan	0 kegiatan	0%	kegiatan	20 kegiatan	
		Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Pembinaan dan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (KOMINDA)	20 rekomendasi	20 rekomendasi	20 rekomendasi	20 rekomendasi	100%	20 rekomendasi	60 rekomendasi	
	Pengawasan dan Identifikasi org Asing (POA)	Jumlah kegiatan Pengawasan dan Identifikasi org Asing (POA)	12 kegiatan	0 kegiatan	12 kegiatan	0 kegiatan	0%	kegiatan	0 kegiatan	
		Jumlah rekomendasi hasil koordinasi	20 rekomendasi	20 rekomendasi	20 rekomendasi	20 rekomendasi	100%	20 rekomendasi	60 rekomendasi	

		Pengawasan dan Identifikasi org Asing (POA)								
	Sosialisasi pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras bagi masyarakat	Jumlah Peserta Sosialisasi pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras bagi masyarakat	100 org	100 org	100 org	100 org	100%	100 org	300 org	
	Sosialisasi Optimalisasi Ketahanan Sosial Ekonomi bagi Aparat yang membidangi Ketahanan Sosial Ekonomi Tingkat Kota Makassar	Jumlah Peserta Sosialisasi Optimalisasi Ketahanan Sosial Ekonomi bagi Aparat yang membidangi Ketahanan Sosial Ekonomi Tingkat Kota Makassar	100 org	100 org	100 org	100 org	100%	100 org	300 org	
8	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase jumlah konflik umat beragama dan etnis yang tertangani	80 %	100 %	95 %	100 %	105%	95 %	295 %	369%
	Sosialisasi peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah Peserta Sosialisasi peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	100 org	100 org	100 org	100 org	100%	100 org	300 org	
	Sosialisasi Peningkatan Toleransi antar Budaya, Suku dan Etnis	Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Toleransi antar Budaya, Suku dan Etnis	100 org	100 org	100 org	100 org	100%	100 org	300 org	
	Pemantauan dan Verifikasi Rencana Pendirian Rumah Ibadah	Jumlah kegiatan Pemantauan dan Verifikasi Rencana Pendirian Rumah Ibadah	12 bulan	bulan	12 bulan	0 bulan	0%	bulan	0 bulan	
		Jumlah rekomendasi hasil Pemantauan dan Verifikasi Rencana Pendirian Rumah Ibadah	20 rekomendasi	20 rekomendasi	20 rekomendasi	20 rekomendasi	100%	20 rekomendasi	60 rekomendasi	
	Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan Kota Makassar	Jumlah Peserta Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan	100 org	100 org	100 org	100 org	100%	100 org	300 org	

		Kota Makassar								
	Sosialisasi Peningkatan Peran Tokoh Etnis dalam rangka menciptakan situasi kondusif	Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Peran Tokoh Etnis dalam rangka menciptakan situasi kondusif	100 org	100 org	100 org	100 org	100%	100 org	300 org	
	Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Bela Negara bagi Generasi Muda	Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Bela Negara bagi Generasi Muda	100 org	100 org	100 org	100 org	100%	100 org	300 org	
	Forum Dialog peningkatan peran tokoh agama dalam memperkuat kerukunan hidup umat beragama	Jumlah Peserta Forum Dialog peningkatan peran tokoh agama dalam memperkuat kerukunan hidup umat beragama	100 org	200 org	100 org	0 org	0%	200 org	400 org	
	Wawasan Kebangsaan Kota Makassar	Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan Kota Makassar	6 kegiatan	kegiatan	6 kegiatan	0 kegiatan	0%	kegiatan	0 kegiatan	
		Jumlah rekomendasi hasil koordinasi wawasan kebangsaan Kota Makassar	20 rekomendasi	20 rekomendasi	20 rekomendasi	20 rekomendasi	100%	20 rekomendasi	60 rekomendasi	
	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	12 kegiatan	kegiatan	12 kegiatan	0 kegiatan	0%	kegiatan	0 kegiatan	
		Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	20 rekomendasi	20 rekomendasi	20 rekomendasi	20 rekomendasi	100%	20 rekomendasi	60 rekomendasi	
	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Jumlah kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	12 kegiatan	kegiatan	12 kegiatan	0 kegiatan	0%	kegiatan	0 kegiatan	
		Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	20 rekomendasi	20 rekomendasi	20 rekomendasi	20 rekomendasi	100%	20 rekomendasi	60 rekomendasi	
	Dialog Penanganan perilaku negatif pada remaja	Meningkatnya kesadaran mengenai perilaku negatif pada remaja	120 org	0 org	120 org	0 org	0%	0 org	0 org	

9	Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	Menekan persentase pengguna narkotika 1,9% pertahun dari jumlah penduduk Kota Makassar	0 % dari jumlah penduduk kota Makassar	1,5 % dari jumlah penduduk kota Makassar	1,5 % dari jumlah penduduk kota Makassar	2,8 % dari jumlah penduduk kota Makassar	187%	1,5 % dari jumlah penduduk kota Makassar	5,8 % dari jumlah penduduk kota Makassar	
		Jumlah sample yang diperiksa dan dideteksi dini	0 sampel	701 sampel	3000 sampel	750 sampel	25%	3000 sampel	4451 sampel	
		Persentase Ketersediaan Data Pengguna, Pengedar dan Bandar Narkotika	0 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	300 %	
	Penyuluhan Bahaya Narkoba	Jumlah Siswa/i SD dan SMP yang mendapat penyuluhan Bahaya Narkoba	875 org	875 org	875 org	875 org	100%	875 org	2625 org	
	Penyuluhan Bahaya Narkoba Bagi Masyarakat Lorong	Jumlah masyarakat lorong yang mendapat penyuluhan bahaya narkoba	200 org	200 org	200 org	200 org	100%	200 org	600 org	
	Kampanye Bulan Anti Narkoba	Jumlah kegiatan kampanye bulan anti narkoba	1 kali kampanye	1 kali kampanye	1 kali kampanye	1 kali kampanye	100%	1 kali kampanye	3 kali kampanye	
	Pelatihan Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba	Jumlah peserta pelatihan Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba	100 org	100 org	100 org	0 org	0%	100 org	200 org	
	Pendataan dan penyajian data pengguna narkoba	Jumlah kegiatan pendataan yang dilaksanakan	6 kali pendataan	4 kali pendataan	4 kali pendataan	4 kali pendataan	100%	6 kali pendataan	14 kali pendataan	
	Koordinasi Penanggulangan Bahaya Narkoba	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi penanggulangan bahaya narkoba	20 rekomendasi	20 rekomendasi	20 rekomendasi	20 rekomendasi	100%	20 rekomendasi	60 rekomendasi	
	Pemeriksaan dan deteksi dini pengguna narkoba	Jumlah sample yang diperiksa dan dideteksi dini	2700 sampel	750 sampel	750 sampel	750 sampel	100%	2700 sampel	4200 sampel	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar dalam pelaksanaannya disesuaikan tugas pokok dan fungsi telah ditentukan oleh perangkat daerah. Adapun hasil analisa pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar adalah sebagaimana tertuang dalam **Tabel T-C-30**.

TABEL T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MAKASSAR

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran			90 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur			90 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	66,15 %	100 %	100 %	
3	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Disiplin bagi aparatur			90 %	90 %	100 %	100 %	100 %	95 %	95 %	100 %	100 %	
4	Cakupan aparatur yang mendapatkan pelatihan kompeten dibidangnya			20 Orang	20 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	10 Orang	4 Orang	4 Orang	
5	Persentase capaian kinerja yang termuat dalam citizen's charter SKPD			90 %	90 %	100 %	100 %	100 %	0 %	0 %	100 %	100 %	

6	Persentase organisasi kemasyarakatan / politik mitra yang aktif, terdaftar dan telah mendapatkan pembinaan dalam penguatan kesatuan bangsa			19,49 %	38,99 %	58,48 %	79,24 %	100 %	97,2 %	12,87 %	100 %	100 %	
7	Persentase jumlah konflik dan gangguan keamanan horizontal yang tertangani			80 %	83 %	85 %	90 %	95 %	100 %	100 %	95 %	95 %	
8	Persentase jumlah konflik umat beragama dan etnis yang tertangani			80 %	80 %	80 %	90 %	95 %	100 %	100 %	95 %	95 %	
9	Menekan persentase pengguna narkoba 1,9 % pertahun dari jumlah penduduk Kota Makassar			0 % dari jumlah penduduk kota Makassar	0 % dari jumlah penduduk kota Makassar	1,7 % dari jumlah penduduk kota Makassar	1,6 % dari jumlah penduduk kota Makassar	1,5 % dari jumlah penduduk kota Makassar	1,5 % dari jumlah penduduk kota Makassar	2,8 % dari jumlah penduduk kota Makassar	1,5 % dari jumlah penduduk kota Makassar	1,5 % dari jumlah penduduk kota Makassar	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota Makassar Nomor 87 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar adalah salah satu organisasi perangkat daerah Kota Makassar yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya angka kriminalitas
2. Meningkatnya kasus kejahatan dan kekerasan
3. Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang
4. Perkembangan demokrasi, yaitu minimnya pengetahuan masyarakat dalam berdemokrasi, sehingga rentan dengan munculnya konflik antar suku dan golongan, hal ini juga merupakan hal serius yang perlu ditangani kedepan
5. Masih adanya penggunaan cara-cara penyampaian pendapat yang mengabaikan/melecehkan simbol-simbol negara, bahkan ada yang cenderung anarkis dan masih adanya kecenderungan lebih mementingkan kepentingan kelompok dari pada kepentingan umum
6. Masih adanya potensi konflik horizontal yang bernuansa SARA, dan konflik politik. Selain itu, masih terdapat gejala politisasi nilai-nilai agama dan kepercayaan sebagai bagian dari pertentangan kepentingan politik dan kekuasaan selama beberapa tahun terakhir
7. Belum optimalnya pendayagunaan SDM aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar
8. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi dan database Partai Politik, Ormas/LSM, dan OKP

Gambaran isu-isu strategis di atas membawa dampak yang signifikan, sehingga pencapaian visi dan misi Walikota Makassar yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas menjadi kurang maksimal. Berdasarkan isu-isu strategis di atas diperlukan langkah-langkah strategis yang penting dilakukan guna mendukung pencapaian visi Kota Makassar, **“Percepatan Mewujudkan Makassar kota Dunia Yang Sombere’ & Smart City dengan Imunitas Kuat Untuk Semua”**. Langkah-langkah strategis tersebut antara lain, yaitu :

1. Penguatan kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar

2. Koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan aparat keamanan, Forum-forum (FKUB, FKDM, FPK), instansi terkait dalam penanganan masalah strategis dan konflik sosial, terorisme dan radikalisme di daerah.
3. Peningkatan Pengawasan dan Penanganan Orang Asing, Lembaga Asing, kewaspadaan dini masyarakat dan penanganan konflik sosial.
4. Peningkatan pemahaman dan penguatan nilai-nilai Idiologi Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI (empat konsensus nasional) dan Wawasan Kebangsaan.
5. Peningkatan koordinasi, kerjasama dan konsolidasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi untuk mewujudkan keutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
6. Peningkatan politik Cerdas dan Berintegritas melalui peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat dan penguatan peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik bagi masyarakat.

Enam langkah strategis di atas diharapkan dapat menjadi prioritas dalam penyusunan program dan kegiatan pada tahun 2022, untuk selanjutnya mendapatkan alokasi anggaran yang memadai.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022, menetapkan prioritas pembangunan pada tahun 2022 sebagai berikut : Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2021-2026 pada Misi I **“Revolusi SDM dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi”** dengan program strategis **“Perkuatan Keimanan Umat”** program dan kegiatan yaitu :

- 1) Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Pimpinan

Anggaran untuk program dan kegiatan tersebut disesuaikan dengan plafon pagu indikatif yang ada pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2022.

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar tahun 2022 dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana tidak sesuai dengan adanya rancangan awal RKPD. Hal ini disebabkan bahwa rancangan awal RKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, yang program dan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program dan Kegiatan pada Permendagri 90 Tahun 2019 mengalami penyesuaian pemuktahiran dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang disajikan pada pada **Tabel T-C-31** berikut :

TABEL T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MAKASSAR

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)		
(1)					(2)	(8)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4)	(5)	(6)	(12)	
8	8	1	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100%	5.675.947.550	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100%	6.568.590.309	
8	8	1	1	2.01		Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Tersusunnya Dokumen Renja, Renstra, Dokumen Rka, Dokumen Dpa Dan Lakip Badan Kesbangpol	5 Dokumen	59.239.000	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Tersusunnya Dokumen Renja, Renstra, Dokumen Rka, Dokumen Dpa Dan Lakip Badan Kesbangpol	5 Dokumen	338.872.600	
8	8	1	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Tersusun	1 Dokumen	30.256.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Tersusun	1 Dokumen	306.891.200	
8	8	1	1	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Rka-Skpd Yang Tersusun	1 Dokumen	12.760.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Rka-Skpd Yang Tersusun	1 Dokumen	12.760.500	
8	8	1	1	2.02		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan Rka-Skpd Yang Tersusun	1 Dokumen	7.695.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan Rka-Skpd Yang Tersusun	1 Dokumen	7.695.000	
8	8	1	1	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Dpa-Skpd Yang Tersusun	1 Dokumen	6.175.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Dpa-Skpd Yang Tersusun	1 Dokumen	6.175.000	
8	8	1	1	2.02	02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan Dpa-Skpd Yang Tersusun	1 Dokumen	2.352.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-KPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan Dpa-Skpd Yang Tersusun	1 Dokumen	2.352.000	

						DPA-KPD		Tersusun											
8	8	1	1	2.02	06	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Asn Dan Non Asn Serta Dokumen Laporan Keuangan Yang Tersedia	64 Orang	4.843.698.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Asn Dan Non Asn Serta Dokumen Laporan Keuangan Yang Tersedia	64 Orang	6.205.509.300				
8	8	1	1	2.02	07	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Gaji Dan Tunjangan Asn Yang Tersusun	1 Dokumen	4.179.073.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Gaji Dan Tunjangan Asn Yang Tersusun	1 Dokumen	5.755.710.300				
8	8	1	1	2.03		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Makassar	Jumlah Tenaga Administrasi Pelaksana Tugas	55 orang	311.760.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Makassar	Jumlah Tenaga Administrasi Pelaksana Tugas	55 orang	401.760.000				
8	8	1	1	2.03	01	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd	1 dokumen	318.047.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd	1 dokumen	20.127.000				
8	8	1	1	2.03	06	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Makassar	Jumlah Koordinasi Yang Dilaksanakan	2 Kali koordinasi	3.791.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Makassar	Jumlah Koordinasi Yang Dilaksanakan	2 Kali koordinasi	-				
8	8	1	1	2.03	07	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Makassar	Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1.200.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Makassar	Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	-				
8	8	1	1	2.03	08	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Pengelolaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Yang Tersusun	1 Dokumen	5.045.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Pengelolaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Yang Tersusun	1 Dokumen	5.045.000				
8	8	1	1	2.03	09	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Makassar	Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran Skpd	2 kali koordinasi	1.915.000	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Makassar	Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran Skpd	2 kali koordinasi	-				
8	8	1	1	2.03	12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis	Kota Makassar	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	22.867.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Makassar	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	22.867.000				

							Realisasi Anggaran										
8	8	1	1	2.03	13	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Asn Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	0	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Asn Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	0	-		
8	8	1	1	2.03	15	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Makassar	Jumlah Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	0	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Makassar	Jumlah Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	0	-		
8	8	1	1	2.03	18	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Kota Makassar	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	-	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Kota Makassar	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	-		
8	8	1	1	2.03	29	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	16 Jenis	364.458.150	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	16 Jenis	252.039.000		
8	8	1	1	2.03	30	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia	3 Jenis	10.738.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia	3 Jenis	10.738.000		
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	4 buah	105.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	4 buah	-		
8	8	1	1	2.03	32	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Makassar	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia	3 Jenis	90.520.150	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Makassar	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia	3 Jenis	84.808.000		
8	8	1	1	2.03	34	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Makassar	Jumlah Bahan Cetak Dan Penggandaan Yang Tersedia	10000 eksamplar	39.040.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Makassar	Jumlah Bahan Cetak Dan Penggandaan Yang Tersedia	10000 eksamplar	37.333.000		
8	8	1	1	2.04		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Makassar	Jumlah Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-	6 eksamplar	15.660.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Makassar	Jumlah Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-	6 eksamplar	15.660.000		

								Undangan Yang Tersedia				Undangan Yang Tersedia				
8	8	1	1	2.04	02	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar	Jumlah Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Yang Dilaksanakan	5 Kegiatan	103.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar	Jumlah Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Yang Dilaksanakan	5 Kegiatan	103.500.000	
8	8	1	1	2.04	09	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Makassar	Jumlah Barang Dan Jasa Yang Tersedia	8 unit	21.890.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Makassar	Jumlah Barang Dan Jasa Yang Tersedia	8 unit	26.959.000	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Komputer Yang Terpelihara Dengan Baik	8 unit	21.890.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Komputer Yang Terpelihara Dengan Baik	8 unit	26.959.000	
8	8	1	2			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	Jumlah Surat Masuk Dan Keluar Serta Jasa Non Asn Yang Disediakan	1000 surat	328.662.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	Jumlah Surat Masuk Dan Keluar Serta Jasa Non Asn Yang Disediakan	1000 surat	408.289.600	
8	8	1	2	2.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar	Jumlah Surat Masuk Dan Keluar Yang Diterima Dan Diproses	1000 surat	318.508.800	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar	Jumlah Surat Masuk Dan Keluar Yang Diterima Dan Diproses	1000 surat	398.136.000	
8	8	1	2	2.01	01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Makassar	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Tersedia	16 orang	10.153.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Makassar	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Tersedia	16 orang	10.153.600	
8	8	1	2	2.01	02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan/ Mobil Jabatan Yang Dilakukan Pemeliharaan Rutin/Berkala	16 Unit	58.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan/ Mobil Jabatan Yang Dilakukan Pemeliharaan Rutin/Berkala	16 Unit	58.000.000	
8	8	1	2	2.01	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Danoperasional Yang Terpelihara Dengan Baik	17 Unit	40.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Danoperasional Yang Terpelihara Dengan Baik	17 Unit	40.000.000	

8	8	1	2	2.01	04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terpelihara Dengan Baik	1 Unit	18.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terpelihara Dengan Baik	1 Unit	18.000.000	
8	8	1	2	2.01	05	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kota Makassar	Persentase Kelompok Masyarakat Yang Mendapat Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	100%	1.361.025.600	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kota Makassar	Persentase Kelompok Masyarakat Yang Mendapat Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	100%	1.198.668.600	
8	8	1	3			Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Makassar	Jumlah Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Yang Dirumuskan	2 Kebijakan	1.361.025.600	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Makassar	Jumlah Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Yang Dirumuskan	2 Kebijakan	1.198.668.600	
8	8	1	3	2.01		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Makassar	Jumlah Program Kerja Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan Yang Disusun	2 Program	985.968.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Makassar	Jumlah Program Kerja Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan Yang Disusun	2 Program	-	
8	8	1	3	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan	Kota Makassar	Jumlah Kebijakan Teknis Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,	2 Kebijakan	375.057.600	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	Kota Makassar	Jumlah Kebijakan Teknis Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan	2 Kebijakan	1.198.668.600	

						Sejarah Kebangsaan		Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan Yang Dirumuskan			Kebangsaan		Sejarah Kebangsaan Yang Dirumuskan			
8	8	1	3	2.01	02	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Kota Makassar	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pesta Demokrasi		2.733.306.400	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Kota Makassar	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pesta Demokrasi		2.618.589.400	
8	8	1	3	2.01	03	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kota Makassar	Jumlah Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Yang Dirumuskan	2 Kebijakan	2.733.306.400	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kota Makassar	Jumlah Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Yang Dirumuskan	2 Kebijakan	2.618.589.400	

	8	1	3	2.01	04	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah Yang Disusun	2 Program	1.167.470.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah Yang Disusun	2 Program	1.118.299.000	
	8	1	3	2.01	05	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		Jumlah Bahan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah Yang Disusun	2 Kebijakan	1.565.836.400	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		Jumlah Bahan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah Yang Disusun	2 Kebijakan	1.500.290.400	
8	8	1	4			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan	Kota Makassar	Persentase Organisasi Kemasyarakatan		183.218.000	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi	Kota Makassar	Persentase Organisasi Kemasyarakatan		6.473.008.000	

						Organisasi Kemasyarakatan		Yang Terdaftar Dan Mendapat Pembinaan Sesuai Dengan Ketentuan			Kemasyarakatan		Yang Terdaftar Dan Mendapat Pembinaan Sesuai Dengan Ketentuan			
								Jumlah Ormas/Partai Politik Mitra Yang Aktif Dan Terdaftar					Jumlah Ormas/Partai Politik Mitra Yang Aktif Dan Terdaftar			
8						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Makassar	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2 Kebijakan	183.218.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Makassar	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2 Kebijakan	6.473.008.000	
8	8	1	4	2.01		Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Makassar	Jumlah Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah Yang Disusun	2 Program	154.176.000	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Makassar	Jumlah Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah Yang Disusun	2 Program	85.304.000	
8	8	1	4	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Makassar	Jumlah Bahan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan	2 Kebijakan	29.042.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Makassar	Jumlah Bahan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah Yang Disusun	2 Kebijakan	6.387.704.000	

8	8	1	5			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Makassar	Jumlah Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah Yang Dilaksanakan	2 Kebijakan	224.998.500	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Makassar	Jumlah Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah Yang Dilaksanakan	2 Kebijakan	-	
	8	1	5	2.01		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Makassar	Jumlah Koordinasi Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah Yang Dilaksanakan	4 Kali Koordinasi	220.375.500	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Makassar	Jumlah Koordinasi Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah Yang Dilaksanakan	4 Kali Koordinasi	331.393.000	
	8	1	5	2.01	01	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Kota Makassar	Presentase Konflik Sosial Yang Diselesaikan		547.796.250	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Kota Makassar	Presentase Konflik Sosial Yang Diselesaikan		622.183.600	

8	1	5	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Makassar	Jumlah Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial Yang Dirumuskan	2 Kebijakan	547.796.250	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Makassar	Jumlah Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial Yang Dirumuskan	2 Kebijakan	622.183.600
8	1	5	2.01	03	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Makassar	Jumlah Program Kerja Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah Yang Disusun	2 Program	425.250.800	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Makassar	Jumlah Program Kerja Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah Yang Disusun	2 Program	366.527.000
8	1	6	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	Kota Makassar	Jumlah Bahan Kebijakan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi	2 Kebijakan	122.545.450	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di	Kota Makassar	Jumlah Bahan Kebijakan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik	2 Kebijakan	255.656.600

						di Daerah		Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah Yang Disusun			Daerah		Di Daerah Yang Disusun			
--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--------	--	---------------------------	--	--	--

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah. Berdasarkan uraian diatas, satuan kerja perangkat daerah dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, tidak ada usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut :

**TABEL T-C.32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA
PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022
KOTA MAKASSAR**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Voulme	Catatan
1	2	3	4	5	6
					Tidak ada program/ kegiatan yang berkaitan langsung dengan kegiatan masyarakat dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik khususnya pada tugas-tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat. Hal ini sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Untuk menjamin terciptanya keberhasilan pembangunan dan guna mengatasi tantangan pelaksanaan pembangunan di Kota Makassar Tahun 2022, maka di perlukan keselarasan dan kesinambungan pembangunan antara program pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan mengacu RKP Nasional dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan maka tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2022 **“Percepatan Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Imunitas Kota Yang Kuat”**.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar secara struktural dibawah Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI, untuk itu arah kebijakan dari pusat pada tahun 2022 yang sesuai dengan bidang politik dan pemerintahan umum antara lain :

1. Peningkatan potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional;
2. Kecenderungan peningkatan konflik sosial; isu ini semakin hangat dimunculkan seiring dengan upaya segelintir orang yang memanfaatkan perbedaan etnis, agama dan sebagainya untuk memecah belah keutuhan bangsa;

3. Terorisme dan radikalisme; banyaknya warga negara Indonesia yang teridentifikasi bergabung dengan kelompok terorisme seperti ISIS;
4. Perubahan perilaku sosial masyarakat sebagai dampak teknologi dan informasi;
5. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Indonesia sekarang bukan lagi merupakan negara transit narkoba tetapi merupakan negara pemakai;
6. Melemahnya pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan; seiring dengan pengaruh globalisasi dan kebebasan dalam ruang demokrasi, orang semakin luntur dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosialnya;
7. Kualitas demokrasi; nilai demokrasi yang diidentikkan dengan nilai kebebasan menentukan pilihan, pada kenyataannya hanya berkembang dalam ritual dan seremonial di Sebagian besar kalangan untuk hadir memberikan suara pada saat pemilihan umum;
8. Melemahnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya; bahwa perilaku sosial masyarakat yang sangat konsumtif dan mengikuti hegemoni globalisasi, membawa dampak pada kehidupan yang pragmatis serba instan dan mengabaikan proses yang berkualitas.

Dari kebijakan nasional tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar merumuskan program strategis pada tahun 2021-2026 yaitu **Perkuatan Keimanan Umat**.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Visi Kota Makassar 2025 adalah “Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa yang Berorientasi Global, Berwawasan Lingkungan dan Paling Bersahabat” sehingga untuk menjamin konsistensi serta kesinambungan pembangunan jangka Panjang dan jangka menengah, perhatian difokuskan pada prioritas kebijakan yang menjadi arahan RPJPD untuk periode 2005-2025, sedangkan Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih “Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang Sombere dan Smart City dengan Imunitas Kuat untuk Semua”.

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis. Untuk mendukung misi ke 1 (satu) Walikota Makassar, maka salah satu tujuan Pemerintah Kota Makassar yaitu “Revolusi SDM dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi”

Tujuan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar yang disesuaikan dengan tujuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah dibuat Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2022 yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan sasaran Meningkatkan Aksesibilitas dan

Kualitas Pendidikan, indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM), target kinerja tahun 2022 yaitu 82,95%.

Adapun penjabaran tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target kinerja sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Tahun 2021 – 2026 pada tabel sebagai berikut :

TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MAKASSAR

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				
				(1) 2022	(2) 2023	(3) 2024	(4) 2025	(5) 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	82,95%	83,3%	83,67%	84,05%	84,45%

3.3 Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan rancangan awal RKPD, Program/kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar mempunyai 6 (enam) rumusan program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 37 sub kegiatan dengan total pagu sebesar Rp. 18.357.000.000,-. Berikut adalah rangkaian program dan kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar yaitu :

A. Program Pendukung

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 5. Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
 6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 7. Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 2. Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Utama yaitu :

- 1) **Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan**
 - a) **Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- 2) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**
- a) Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**
1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
- 3) Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**
- a) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**
1. Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- 4) Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya**
- a) Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya**

1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

a) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Selanjutnya program dan kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaannya sebagai berikut :

TABEL T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DA POLITIK KOTA MAKASSAR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (2023)						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)					
8	8	1						18.353.278.735	20.188.606.609					
8	8	1	1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	100%	5.971.445.735	APBD	-	100%	6.568.590.309	
8	8	1	1	2.01	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renja, Renstra, Dokumen Rka, Dokumen Dpa Dan Lakip Badan Kesbangpol	Kota Makassar	5 Dokumen	308.066.000	APBD	-	5 Dokumen	338.872.600	
8	8	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Tersusun	Kota Makassar	1 Dokumen	278.992.000	APBD		1 Dokumen	306.891.200
8	8	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rka-Skpd Yang Tersusun	Kota Makassar	1 Dokumen	12.527.000	APBD		1 Dokumen	13.779.700
8	8	1	1	2.02		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan Rka-Skpd Yang Tersusun	Kota Makassar	1 Dokumen	7.480.000	APBD		1 Dokumen	8.228.000
8	8	1	1	2.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Dpa-Skpd Yang Tersusun	Kota Makassar	1 Dokumen	7.465.000	APBD		1 Dokumen	8.211.500
8	8	1	1	2.02	2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-KPD	Jumlah Dokumen Perubahan Dpa-Skpd Yang Tersusun	Kota Makassar	1 Dokumen	1.602.000	APBD		1 Dokumen	1.762.200
8	8	1	1	2.02	6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Asn Dan Non Asn Serta Dokumen Laporan Keuangan Yang Tersedia	Kota Makassar	55 Orang / 5 Dokumen	4.077.802.360	APBD	-	64 Orang	4.485.582.596
8	8	1	1	2.02	7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Gaji Dan Tunjangan Asn Yang Tersusun	Kota Makassar	1 Dokumen	3.672.475.360	APBD		1 Dokumen	4.039.722.896

8	8	1	1	2.03		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Pelaksana Tugas	Kota Makassar	55 orang	385.200.000	APBD		55 orang	423.720.000
8	8	1	1	2.03	1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd	Kota Makassar	1 dokumen	20.127.000	APBD		1 dokumen	22.139.700
8	8	1	1	2.03	6	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi Yang Dilaksanakan	Kota Makassar	2 Kali koordinasi	-	APBD		2 Kali koordinasi	-
8	8	1	1	2.03	7	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Makassar	1 dokumen	-	APBD		1 dokumen	-
8	8	1	1	2.03	8	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Yang Tersusun	Kota Makassar	1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	-
8	8	1	1	2.03	9	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran Skpd	Kota Makassar	2 kali koordinasi	-	APBD		2 kali koordinasi	-
8	8	1	1	2.03	12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Makassar	1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	-
8	8	1	1	2.03	13	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Asn Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Kota Makassar	76 Orang	167.650.000	APBD	-	0	184.415.000
8	8	1	1	2.03	15	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Kota Makassar	0	120.000.000	APBD		0	132.000.000
8	8	1	1	2.03	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	Kota Makassar	76 Pasang	47.650.000	APBD		0	52.415.000
8	8	1	1	2.03	29	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	Kota Makassar	16 Jenis	374.062.500	APBD	-	16 Jenis	411.468.750
8	8	1	1	2.03	30	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia	Kota Makassar	3 Jenis	3.745.500	APBD		3 Jenis	4.120.050
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	Kota Makassar	4 buah	-	APBD		4 buah	-
8	8	1	1	2.03	32	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia	Kota Makassar	3 Jenis	70.257.000	APBD		3 Jenis	77.282.700

8	8	1	1	2.03	34	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bahan Cetak Dan Penggandaan Yang Tersedia	Kota Makassar	10000 eksamplar	-	APBD		10000 eksamplar	-
8	8	1	1	2.04		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Tersedia	Kota Makassar	6 eksamplar	34.560.000	APBD		6 eksamplar	38.016.000
8	8	1	1	2.04	2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Yang Dilaksanakan	Kota Makassar	5 Kegiatan	265.500.000	APBD		5 Kegiatan	292.050.000
8	8	1	1	2.04	9	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Dan Jasa Yang Tersedia	Kota Makassar	8 unit	678.156.375	APBD	-	8 unit	745.972.013
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Komputer Yang Terpelihara Dengan Baik	Kota Makassar	8 unit	678.156.375	APBD		8 unit	745.972.013
8	8	1	2			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Surat Masuk Dan Keluar Serta Jasa Non Asn Yang Disediakan	Kota Makassar	1000 surat	298.602.000	APBD	-	1000 surat	328.462.200
8	8	1	2	2.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk Dan Keluar Yang Diterima Dan Diproses	Kota Makassar	1000 surat	298.602.000	APBD		1000 surat	328.462.200
8	8	1	2	2.01	1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Tersedia	Kota Makassar	16 orang	-	APBD		16 orang	-
8	8	1	2	2.01	2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan/ Mobil Jabatan Yang Dilakukan Pemeliharaan Rutin/Berkala	Kota Makassar	16 Unit	67.106.500	APBD	-	16 Unit	73.817.150
8	8	1	2	2.01	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Danoperasional Yang Terpelihara Dengan Baik	Kota Makassar	17 Unit	39.796.500	APBD		17 Unit	43.776.150
8	8	1	2	2.01	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terpelihara Dengan Baik	Kota Makassar	1 Unit	27.310.000	APBD		1 Unit	30.041.000
8	8	1	2	2.01	5	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kelompok Masyarakat Yang Mendapat Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kota Makassar	100%	488.792.600	APBD	-	100%	537.671.860
8	8	1	3			Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis Dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Yang Dirumuskan	Kota Makassar	2 Kebijakan	488.792.600	APBD	-	2 Kebijakan	537.671.860

8	8	1	3	2.01		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Program Kerja Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan Yang Disusun	Kota Makassar	2 Program	-	APBD		2 Program	-
8	8	1	3	2.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan Yang Dirumuskan	Kota Makassar	2 Kebijakan	488.792.600	APBD		2 Kebijakan	537.671.860
8	8	1	3	2.01	2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pesta Demokrasi	Kota Makassar		3.694.405.600	APBD	-		4.063.846.160
8	8	1	3	2.01	3	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Yang Dirumuskan	Kota Makassar	2 Kebijakan	3.694.405.600	APBD	-	2 Kebijakan	4.063.846.160
	8	1	3	2.01	4	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah Yang Disusun		2 Program	1.045.298.000	APBD		2 Program	1.149.827.800

						Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Bahan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah Yang Disusun													-	
						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah, serta pemantauan situasi politik	Jumlah Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah, serta pemantauan situasi politik yang dilaksanakan				2 Kali koordinasi	2.649.107.600	APBD							2 Kali koordinasi	2.914.018.360
8	8	1	4			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Persentase Organisasi Masyarakat Yang Terdaftar Dan Mendapat Pembinaan Sesuai Dengan Ketentuan	Kota Makassar				6.566.444.600	APBD		-						7.223.089.060
							Jumlah Ormas/Partai Politik Mitra Yang Aktif Dan Terdaftar														
8						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Kota Makassar		2 Kebijakan		6.566.444.600	APBD		-					2 Kebijakan	7.223.089.060

8	8	1	4	2.01		Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah Yang Disusun	Kota Makassar	2 Program	240.259.600	APBD		2 Program	264.285.560
8	8	1	4	2.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Bahan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah Yang Disusun	Kota Makassar	2 Kebijakan	6.326.185.000	APBD		2 Kebijakan	6.958.803.500
8	8	1	4	2.01	3	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Kelompok Masyarakat Yang Medapat Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Kota Makassar		756.589.000	APBD	-		832.247.900
8	8	1	4	2.01	4	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah Kebijakan Teknis Dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya Yang Dirumuskan	Kota Makassar		756.589.000	APBD	-		832.247.900
8	8	1	4	2.01	5	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Bahan Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah Yang Disusun	Kota Makassar	2 Kebijakan	37.337.000	APBD		2 Kebijakan	41.070.700
8	8	1	5			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah Yang Dilaksanakan	Kota Makassar	2 Kebijakan	-	APBD		2 Kebijakan	-

8	1	5	2.01		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Koordinasi Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah Yang Dilaksanakan	Kota Makassar	4 Kali Koordinasi	719.252.000	APBD		4 Kali Koordinasi	791.177.200
8	1	5	2.01	1	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Presentase Konflik Sosial Yang Diselesaikan	Kota Makassar		875.601.200	APBD	-		963.161.320
8	1	5	2.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial Yang Dirumuskan	Kota Makassar	2 Kebijakan	875.601.200	APBD	-	2 Kebijakan	963.161.320
8	1	5	2.01	3	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Program Kerja Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah Yang Disusun	Kota Makassar	2 Program	456.732.600	APBD		2 Program	502.405.860
8	1	6	2.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Bahan Kebijakan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah Yang Disusun	Kota Makassar	2 Kebijakan	418.868.600	APBD		2 Kebijakan	460.755.460

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Tahun 2022 yang dibahas pada Bab III, dengan merujuk kepada hasil evaluasi kinerja Tahun 2021, tujuan dan sasaran, Program Prioritas Daerah dalam RPJPD, Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Rencana Kerja Perangkat Daerah berisikan Program dan Kegiatan, dimana dalam setiap program kerja operasional selanjutnya dijabarkan ke dalam sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dikandung dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Dengan demikian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar menetapkan Rencana Kerja dan Pendanaan indikatif Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp.278.992.000,-
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan pagu indikatif sebesar Rp.12.527.000,-
- 3) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan pagu indikatif sebesar Rp. 7.480.000 ,-
- 4) Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan pagu indikatif sebesar Rp. 7.465.000 ,-
- 5) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.602.000 ,-

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu indikatif sebesar Rp. 3.672.475.360 ,-
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan pagu indikatif sebesar Rp. 385.200.000 ,-
- 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan pagu indikatif sebesar Rp. 20.127.000 ,-
- 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan pagu indikatif sebesar Rp. 0 ,-
- 5) Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan pagu indikatif sebesar Rp. 0 ,-

- 6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 0 ,-
- 7) Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dengan pagu indikatif sebesar Rp. 0 ,-
- 8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan pagu indikatif sebesar Rp. 0 ,-

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan pagu indikatif sebesar Rp. 120.000.000 ,-
- 2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan pagu indikatif sebesar Rp. 47.650.000 ,-

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp. 3.745.500 ,-
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp. 0 ,-
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp. 70.257.000,-
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 37.333.000 ,-
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 34.560.000 ,-
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu indikatif sebesar Rp. 2.65.500.000 ,-

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu indikatif sebesar Rp. 678.156.375 ,-

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan pagu indikatif sebesar Rp. 298.602.000 ,-
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp. 0 ,-

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 39.796.500 ,-
- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan pagu indikatif sebesar Rp. 27.310.000 ,-

- 2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan**
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**
 - 1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 0 ,-
 - 2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 488.792.600 ,-
- 3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**
 - 1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.045.298.000 ,-
 - 2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp. 0 ,-
 - 3) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp. 2.649.107.600 ,-
- 4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**
 - 1) Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp. 240.259.600 ,-
 - 2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan

Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp. 6.326.185.000 ,-

5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

a. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya

- 1) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp. 37.337.000 ,-
- 2) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp. 0 ,-
- 3) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp. 719.252.000 ,-

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

- 1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp. 456.732.600 ,-
- 2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp. 418.868.600 ,-

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2022. Kegiatan, indikator, target kinerja, dan pagu anggaran disusun dalam matrik dan bersifat indikatif untuk tahun yang rencana kerja perangkat daerah disusun dan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran (Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran).


Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun yang lalu ada beberapa hal perlu mendapat perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021, antara lain :

1. Adanya beberapa rencana kegiatan yang belum terlaksana dengan baik, disebabkan karena adanya gejala non alam pandemik *covid-19*
2. Terjadinya rasionalisasi anggaran keuangan untuk dialihkan sebagai fokus pada penanganan pandemik Covid 19.

Semoga Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar ini menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2022 dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pemerintah di Bidang kesatuan bangsa dan politik untuk mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan mendukung pencapaian Visi Pemerintah Kota Makassar yaitu ***“Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang Sombere’ & Smart City dengan Imunitas Kuat Untuk Semua”***.

Makassar, 5 Juli 2021

Plt. KEPALA BADAN,


AKHMAD NAMSUNG, S.Ag, MM
Pangkat : Pembina
NIP. 19670524 200601 1 004